

LAMPUNG BARAT



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025.

Perubahan dalam Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.
17. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
18. Peraturan Bupati No 25 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan perubahan renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maupun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 yang dilaksanakan dalam berbagai program, kegiatan dan sub

kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 (lima) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 16 (enam belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebelum adanya efisiensi anggaran Adalah sebesar **5.199.260.846,-** (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan efisiensi anggaran belanja sebesar **Rp. 4.797.122.896,-** (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar **Rp. 936.713.588,-** (*Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau **18,02** persen

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 41 sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100%

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sedang dalam proses dan berlangsung sampai dengan akhir Tahun.
2. Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sedang dalam proses pelaksanaan
3. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada semester ke-II Tahun 2025 hal ini menyesuaikan dengan jadwal

penyusunan Perubahan APBD yang disusun oleh perangkat daerah terkait.

4. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada semester ke-II Tahun 2025 hal ini menyesuaikan dengan jadwal penyusunan APBD Tahun 2026 yang disusun oleh perangkat daerah terkait.
5. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD realisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada semester ke-II Tahun 2025 hal ini menyesuaikan dengan jadwal penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 yang disusun oleh perangkat daerah terkait.
6. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi *fisik/output sebesar 50 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sedang dalam proses pelaksanaan.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dirancang pelaksanaannya selama 12 bulan sehingga sampai dengan bulan Maret realisasi fisiknya masih sebesar 25 persen sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.

9. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDrealisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan akhir Tahun Anggaran 2025.
10. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
11. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
12. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada semester ke-II Tahun 2025
13. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawairealisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dikarenakan penyusunan SKP dimulai pada awal Januari s.d akhir Desember 2025
14. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas fungsi realisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena menunggu surat/penawaran dari pihak penyelenggara

15. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
16. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaanrealisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
18. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
19. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
20. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel realisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II.

21. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel realisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II dan masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan.
22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran

sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
27. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi *fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II.
28. Sub Kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan pelayanan yang dirancang pelaksanaannya selama 12 bulan sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
29. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan ini mencakup pelayanan keliling Pendaftaran Penduduk
30. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan ini mencakup pelayanan pindah datang penduduk.

31. Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pelayanan pencatatan sipil
32. Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang bekerja sama dengan tempat ibadah dalam penerbitan dokumen akta perkawinan dirumah ibadah
33. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil realisasi *fisik/output sebesar 0 persen belum mencapai 100% dikarenakan, sub kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.
34. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak/belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, berupa pembuatan laporan setiap bulan ke provinsi dan pusat, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
35. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub

kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.

36. Sub Kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen, sub kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan buku agregat kependudukan.
37. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
38. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya pada semester ke-II Tahun 2023.
39. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Disdukcapil Way Tenong) realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.
40. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (UPT Disdukcapil Way Tenong) realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.

41. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Disdukcapil Way Tenong) realisasi *fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga pada akhir tahun anggaran sub kegiatan ini akan dapat mencapai realisasi fisiknya sebesar 100 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berdasar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yaitu sebanyak 5 program dan 16 kegiatan dan 41 sub Kegiatan. Dari sejumlah program dan kegiatan tersebut, belum ada sub kegiatan yang telah selesai dan Target Kinerjanya telah mencapai 100%.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sampai dengan triwulan I tahun 2025 hasilnya, adalah sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja

Capaian target kinerja dari 5 (empat) program selain program rutin adalah rata-rata telah mencapai hasil sesuai /melebihi target sampai dengan triwulan I tahun 2025.

b. Keuangan.

Realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 dapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari pagu murni sebesar 5.199.260.846,- (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 4.797.122.896,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 936.713.588,- (*Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau 18,02 persen

Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

3.1 Jumlah Anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program sebanyak 5 Program, kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.314.990.550,-

3.2 Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program sebanyak 5 Program, kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.199.260.846,-

3.3 Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Pergeseran/efisiensi Tahun 2025

Pada pergeseran/efisiensi Anggaran 2025, terdapat pengurangan pagu dari beberapa sub kegiatan sehingga pagu anggaran menjadi Rp. Rp. 4.797.122.896,-

3.4 Jumlah Anggaran yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD

Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami yang akan diusulkan penambahan pagu anggaran yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sehingga ada penambahan pagu sebesar Rp. 101.040.000,- dari pagu pergeseran

3.5 Jumlah Sub Kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 di bandingkan APBD pergeseran

Tidak ada sub kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan dengan APBD pergeseran

3.6. Jumlah Sub kegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD pergeseran

Tidak ada sub kegiatan yang baru yang muncul pada Renja Perubahan tahun 2022 di bandingkan dengan APBD pergeseran

3.7 Jumlah subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD pergeseran

Tidak ada sub kegiatan yang baru yang muncul pada Renja Perubahan tahun 2022 di bandingkan dengan APBD pergeseran

3.9 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD

Tujuan

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kabupaten Lampung Barat adalah :

“ Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisiensi ”

Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil.

Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu jangka menengah 5 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan
2. Meningkatnya Stakholder yang melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama

Adapun tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adminduk	70,25	75,50	80,50	85,25

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102,15%	102,25%	102,50%
2		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakholder yang mendapatkan hak akses data	47,05%	64,70%	82,35%	100%

3.10. Program Dan Kegiatan

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5 (lima) program, 16 Kegiatan dan 41 sub kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sub Kegiatan

1. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

UPTD Way Tenong

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan sebagai implementasi dari tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang tertib administrasi Kependudukan, dan mencapai tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Pada akhir tahun anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini memerlukan dukungan, sinergi, dan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia demi terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Liwa, 11 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sampai dengan tahun 2024	Target Kinerja DPA Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2023		Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023						
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil										
2	12	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	Dokumen	19	11 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	16 %
					Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun	20 Dokumen	Dokumen	10	5 dokumen	2 dokumen	50 %	2 dokumen	10 %	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	Dokumen	24	Laporan	12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	13 %
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	38 Dokumen	19 Dokumen	11 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	16 %
2	12	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	25 %
2	12	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	25 %
2	12	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
2	12	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-
2	12	01	2	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	48 Dokumen	24 Dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	13 %
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	50 %	28 orang	25 %
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	Dokumen	2	1 laporan	- laporan	-	- laporan	-

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	Dokumen	4	2 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	13 %
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	Dokumen	4	2 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	13 %
2	12	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	50 %	28 orang	25 %
2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	dokumen	2	1 laporan	- laporan	-	- laporan	-
2	12	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 dokumen	dokumen	4	3 laporan	2 laporan	50 %	2 laporan	25 %
2	12	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 dokumen	dokumen	4	2 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	13 %
2	12	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	25 %	
2	12	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50 %	1 dokumen	25 %	
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-	
2	12	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	- dokumen	-	- dokumen	-	
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 paket	paket	2	1 paket	1 paket	50 %	1 paket	25 %
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4 paket	paket	2	2 paket	2 paket	50 %	2 paket	50 %
							Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 Dokumen	Dokumen	4	4 dokumen	4 dokumen	50 %	4 dokumen	25 %
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	2 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	150 %	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	laporan	2	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	150 %

2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	50 %	1 paket	25 %
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4 paket	2 paket	2 paket	2 paket	50 %	2 paket	50 %
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 Dokumen	2 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	50 %	4 dokumen	25 %
2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	2 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	150 %
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	2 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	150 %
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	150 %
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	28 unit	2 unit					
2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	50 %	4 unit	25 %
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	3 unit	3 unit	1 unit	50 %	1 unit	4.2 %
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90,70 %	%					
							Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50 %	3 dokumen	25 %
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	25 %
							Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50 %	2 laporan	25 %

2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	80.5	%	%					
2	12	01	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4	paket	paket					
2	12	01	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	paket					
2	12	01	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	laporan					
2	12	01	2.	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	laporan					
2	12	01	2.08	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	laporan					

LAMPIRAN II
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENIA OPD)
KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Renja Murni			APBD Murni					Perubahan Renja	Nasional	Daerah
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							5,360,406,800	5,199,260,846	4,846,529,546						6,213,561,300			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5,360,406,800								6,213,561,300			
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,360,406,800								6,213,561,300			
123	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,25 %	82,25%	82,25%	3,960,385,500	3,921,729,946	3,797,108,946				82,25 %	4,884,616,300		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 11 Dokumen 12 Laporan	5 Dokumen 11 Dokumen 12 Laporan	5 Dokumen 11 Dokumen 12 Laporan	48,239,000	38,811,000	12,208,000			Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		55,537,700		
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	27,158,000	27,133,000	6,108,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		33,310,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,507,000	967,000	487,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		1,331,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,210,000	795,000	350,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		1,331,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,831,000	1,086,000	736,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		1,464,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,380,000	920,000	413,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		1,464,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,075,000	2,910,000	1,240,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		3,327,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12,078,000	5,000,000	2,874,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		13,310,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapoan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapoan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 28 Orang/bulan	2 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 28 Orang/bulan	2 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 28 Orang/bulan	3,026,558,800	3,085,756,596	3,082,964,596			Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		3,669,182,500		
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 orang/bulan	28 orang/bulan	3,017,485,800	3,080,256,596	3,080,256,596	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		3,659,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,630,000	2,500,000	1,230,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi		3,993,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 unit	19 unit	232,232,500	388,923,000	388,923,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	279,825,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	unit	unit	8,580,000	-		Kab. Lampung Barat, Way Tenong, Puralaksana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	8,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	110,458,400	89,978,400	77,256,400			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	136,012,600	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	3,122,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	41,880,000	39,525,000	40,525,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	66,578,400	48,453,400	34,731,400	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	82,890,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	17 Unit	8 unit	8 unit	134,396,950	142,144,450	100,894,450			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	253,685,000	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 unit	4 unit	55,300,000	106,050,000	64,800,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	146,410,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3 unit	3 unit	12,450,000	10,260,000	10,260,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	23,275,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	1 unit	66,646,950	25,834,450	25,834,450	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	84,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
124	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,20 %	90,20%	90,20%	523,938,400	472,692,000	376,452,400			-		-	90,20 %	387,000,000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	523,938,400	472,692,000	376,452,400			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	387,000,000	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	170,037,000	112,527,000	58,228,400	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	180,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	303,301,400	318,216,000	297,713,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	151,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50,600,000	41,949,000	20,511,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	56,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
125	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	99%	99%	185,900,000	136,131,000	80,328,000			-		-	99 %	204,000,000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	83,100,000	62,662,000	31,366,000			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	90,000,000	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	83,100,000	62,662,000	31,366,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45,500,000	22,509,000	10,377,000			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	52,000,000	

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	34,891,000	27,576,000	23,106,000			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	37,100,000	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16,540,000	11,250,000	11,650,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		18,100,000	UPT DISUKCAPIL WAY TENONG
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18,351,000	16,326,000	11,456,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		19,000,000	UPT DISUKCAPIL WAY TENONG